

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA
TAHUN 2018-2020**

Oleh : Muhammad Muhyidin

Email : muhammadmuhyidin908@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus BinaWidya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Each district only has a few villages that have a village library, and it is rare for a village that has a village library to have complete facilities as well as adequate books and services, and most libraries in the village are only for building displays. Riau Province. In the Regent's Regulation Number 55 of 2016 concerning the Job Description of the Kampar Regency Library and Archives Service in article 6, "The field of library development has the task of organizing the formulation of technical policy materials for library development", in this article it is explained that the Kampar Regency Library and Archives Service has duties in the field of development of libraries, especially the development of village libraries. The lack of role of the Kampar Regency Government in the development of village libraries has caused one of the libraries in Kampar Regency, namely the Rimbo Panjang village library, to not be able to implement the national guideline standard for village libraries.

The purpose of this study is to describe the role of the Kampar Regency Government in the development of the village library in 2018-2020 and to describe the inhibiting factors of the Kampar Regency Government's role in the development of the village library in 2018-2020. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques.

The results of this study found that the role of the Kampar Regency Government as a facilitator in the development of the village library was not maximized, especially the uneven distribution of education and training activities, assistance or funding, the role of the Kampar Regency Government as a regulator in the development of village libraries and the role of the Kampar Regency Government as a regulator has not been maximized. motivator in the development of village libraries, especially the lack of socialization and encouraging the community to participate.

Keywords: Role, Village Library Development

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pada pasal 8 dijelaskan pemerintah daerah berperan menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah provinsi, kabupaten atau kota. Itu artinya pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan perpustakaan diseluruh plosok daerah terutama pengembangan perpustakaan desa.

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan desa, melihat perpustakaan desa memiliki posisi penting untuk menunjang kualitas sumber daya manusia yang unggul serta menambah wawasan yang lebih luas dan terbuka diperlukan sarana pendidikan yang memadai, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat 2 huruf q, menerangkan bahwa perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Setiap kabupaten hanya beberapa desa saja yang memiliki perpustakaan desa, dan jarang sekali desa yang memiliki perpustakaan desa memiliki fasilitas yang lengkap serta buku dan pelayanan yang memadai, dan kebanyakan perpustakaan yang berada didesa hanya sebagai pajangan gedung saja, membuat perpustakaan desa sangat kurang di perhatikan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan desa, dimana desa merupakan daerah yang rawan akan kekurangan kualitas sumber daya manusia, hal itu juga terjadi di di

Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu dari 12 daerah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Riau yang memiliki perpustakaan desa, Kabupaten Kampar memiliki letak yang strategis yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru dan juga berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Barat, memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, memiliki tugas dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai fasilitator pengembangan perpustakaan desa hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kampar pada pasal 6, "Bidang pengembangan perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan perpustakaan".

Kenyataannya pengembangan perpustakaan desa di Kabupaten Kampar masih kurang optimal dalam pelaksanaannya hal itu dapat dari jumlah perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Kampar pada tahun 2018 sampai dengan 2020 memiliki jumlah yaitu 65 perpustakaan desa, jumlah perpustakaan yang Standar Nasional dan sesuai dengan pedoman berjumlah 60 perpustakaan desa atau sekitar 95% dari jumlah perpustakaan yang ada di daerah Kabupaten Kampar, sedangkan perpustakaan desa yang belum Standar Nasional dan tidak sesuai dengan pedoman berjumlah 5 perpustakaan desa atau sekitar 5% dari jumlah perpustakaan desa di daerah Kabupaten Kampar.

Masih kurangnya sosialisasi pedoman standar nasional perpustakaan desa dan kegunaan

serta manfaat perpustakaan desa sehingga perpustakaan desa yang dibangun hanya sekedar pajangan gedung saja dan masih minim dana yang dikeluarkan, hal itu terjadi di perpustakaan desa Rimbo Panjang merupakan perpustakaan desa yang berada di Kecamatan Tambang yang letaknya strategis yaitu berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Perpustakaan Desa Rimbo Panjang masih dikatakan rendah, hal ini tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan perpustakaan desa dimana untuk standar koleksi perpustakaan setiap perpustakaan desa adalah minimal mempunyai koleksi 1000 judul buku.

Struktur organisasi Perpustakaan Desa yang dibentuk di Perpustakaan Desa Rimbo Panjang hanya memiliki 1 orang petugas dalam mengelola yaitu bagian kepala perpustakaan. Dalam struktur organisasi perpustakaan desa sekurang-kurangnya terdiri dari: kepala perpustakaan, pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, pelayanan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah : Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan perpustakaan desa tahun 2018-2020.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian deskriptif merupakan teknik untuk mendapatkan informasi

fenomena dan fakta tentang peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan perpustakaan desa tahun 2018-2020.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kampar dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar, alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kampar karena Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang memiliki perpustakaan desa dan keberadaan perpustakaan desa sekarang hanya sebagai pajangan gedung saja sehingga pengembangan perpustakaan desa tidak maksimal akibatnya kondisi perpustakaan desa masih ada yang tidak sesuai standar nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur, mengelola dan melayani masyarakat didalam suatu negara dengan tujuan menegakan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi hal penting dalam menangani pengembangan perpustakaan desa di Kabupaten Kampar dengan mengaitkan pandangan *Sumadigrat* tentang peran pemerintah saat ini dalam penyediaan sarana dan prasarana publik sebagai berikut: a. Peran Fasilitator, b. Peran Regulator, c. Peran Motivator.

A. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemerintah menciptakan suasana kondusif dalam pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah sebagai fasilitator (yang memberikan fasilitas) dalam bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan

peningkatan keterampilan serta bidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

1. Memberikan Diklat

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia terutama dalam pengembangan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan pada tahun 2018, peserta yang mengikuti kegiatan Diklat ini diikuti 36 peserta dari 12 perpustakaan, namun peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya diikuti kepada perpustakaan desa yang dibina saja sehingga kurangnya pemerataan tenaga perpustakaan desa yang ada di Kabupaten akibatnya masih ada perpustakaan desa yang belum memiliki tenaga perpustakaan desa yang belum sesuai dengan pedoman standar nasional perpustakaan desa, dimana perpustakaan desa memiliki tenaga perpustakaan desa paling sedikit 2 tenaga perpustakaan.

2. Peningkatan Keterampilan

Peningkatan keterampilan merupakan upaya untuk mendorong suatu individu, organisasi atau lembaga untuk lebih terampil dalam memberikan suatu layanan kepada masyarakat dengan tujuan individu, organisasi atau lembaga dapat bekerja dengan optimal. Peningkatan keterampilan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tahun 2018-2020 yaitu melalui program Transformasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial dan terdapat 6 perpustakaan desa yang mengikuti program tersebut dengan

tujuan menjadikan perpustakaan tidak hanya tempat membaca tapi pusat kegiatan masyarakat atau melakukan pemberdayaan tertentu dan tahun 2020 salah satu perpustakaan desa Kabupaten Kampar dinobatkan perpustakaan desa terbaik kedua nasional yaitu diraih oleh perpustakaan desa Laboy Jaya. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam pengembangan perpustakaan desa dengan melakukan peningkatan keterampilan dengan baik.

3. memberikan Bantuan atau Pendanaan

Memberikan bantuan atau pendanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, organisasi atau instansi pemerintahan dan diberikan kepada masyarakat dan lembaga yang membutuhkannya. Peran pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan perpustakaan desa dengan memberikan bantuan dan pendanaan yang berkaitan dengan koleksi dan sarana dan prasarana perpustakaan desa seperti memberikan buku-buku, komputer, kursi, meja dan lainnya belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar hal itu disebabkan adanya keterbatasan dana dan bantuan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar hanya membuka konsultasi seputar pengembangan perpustakaan desa saja akibatnya masih ada perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Kampar belum memiliki koleksi dan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pedoman standar nasional perpustakaan desa. pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai

fasilitator dalam pengembangan perpustakaan desa untuk membuat dan merencanakan anggaran yang berkaitan dengan komponen perpustakaan desa yaitu koleksi dan sarana dan prasarana perpustakaan desa

B. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

1. Menerbitkan Peraturan

Dalam melaksanakan peran Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai regulator dalam pengembangan perpustakaan desa Pemerintah Kabupaten Kampar telah menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan desa yaitu melalui Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 04/DPK/730 Tentang Pembangunan Perpustakaan Desa yang menerangkan bahwa setiap kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar untuk mengalokasikan anggaran kegiatan pengembangan perpustakaan desa, pengadaan bahan buku bacaan melalui dana desa tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Kampar Juga menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dengan tujuan sebagai landasan hukum dalam melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa.

C. Motivator

Peran pemerintah sebagai motivator adalah pemerintah sebagai penggerak masyarakat. Untuk mencapai peran pemerintah sebagai motivator pemerintah harus

mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan sosialisasi pada suatu kegiatan atau pada program tersebut.

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan perpustakaan desa sudah dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama, melakukan sosialisasi kesemua kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Tahap kedua yaitu sosialisasi tentang pentingnya, manfaat dan kegunaan perpustakaan desa dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan secara *online* seperti melalui *fFacebook, Instagram, Website*, Berita dan lain-lain. Upaya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal hal itu disebabkan masih adanya perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Kampar belum mengetahui pedoman standar nasional perpustakaan desa, oleh karena itu pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai motivator dalam pengembangan perpustakaan desa untuk mengoptimalkan sosialisasinya dalam pengembangan perpustakaan desa.

2. Mendorong Masyarakat Berpartisipasi

Mendorong masyarakat berpartisipasi berarti bahwa mengajak masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, keterampilan, bahan dan jasa. Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perpustakaan desa dalam proses kegiatan pengembangan perpustakaan desa tahun 2018-2020 dimulai dengan melakukan pembinaan atau replikasi perpustakaan desa, dan untuk tahun 2018-2020 ada 15 perpustakaan desa yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, dengan adanya pembinaan perpustakaan desa masyarakat dapat lebih berkomitmen dan bersemangat dalam melakukan pengelolaan perpustakaan desa dan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan perpustakaan desa.

Dalam mendorong masyarakat masyarakat untuk berpartisipasi, Pemerintah Kabupaten Kampar juga turun langsung kelapangan dan mengumpulkan pihak-pihak penting seperti kepala desa dan perangkatnya, tokoh masyarakat dan tenaga perpustakaan desa dengan tujuan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengelola perpustakaan desa dengan bersama-sama, karena perpustakaan desa memiliki nilai penting bagi kehidupan dan menjadikan perpustakaan desa menjadi pusat kegiatan masyarakat desa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian, analisis dan pembahasan penulis

yang dilakukan mengenai peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan perpustakaan desa tahun 2018-2020 adalah :

Peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan perpustakaan desa tahun 2018-2020 yaitu sebagai peran fasilitator dengan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga perpustakaan desa, melakukan peningkatan keterampilan pada layanan perpustakaan desa dan memberikan bantuan atau pendanaan dalam hal koleksi dan sarana dan prasarana perpustakaan desa. Peran regulator dengan melakukan penerbitan peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa. Peran Motivator dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang manfaat dan fungsi perpustakaan desa serta pedoman standar nasional perpustakaan desa dan juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perpustakaan desa.

2. Saran

1. Pentingnya Pemerintah Kabupaten Kampar membuat dan meanggarkan bantuan atau pendanaan yang berkaitan dengan koleksi dan sarana dan prasarana seperti koleksi buku, komputer, rak buku, meja dan lainnya dan diberikan kepada perpustakaan desa yang belum sesuai dengan pedoman standar nasional perpustakaan desa dengan tujuan agar dapat membantu mengembangkan perpustakaan desa kearah yang lebih baik.

2. Pemerintah Kabupaten Kampar harus melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga perpustakaan desa, mendorong masyarakat berpartisipasi dalam ikutserta dalam pengelolaan

perpustakaan desa harus dilakukan secara adil dan merata tidak hanya fokus pada perpustakaan desa yang dibina saja tapi fokus pada seluruh perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Kampar sehingga pengembangan perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Kampar berjalan sesuai dengan pedomanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amru Alba, Rudi Kurniawan. 2019. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin Studi Kasus Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*. Lhoksumawe : Unimal Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aswasulasikin. 2017. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pendidikan(Kajian Fenomenologi di Sekolah Dasar)*. Sleman : Depublish. Hlm.65.
- Barbara Gubbin, Christie Koontz. 2018. *Layanan Perpustakaan Umum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desantralisasi Paradigma Baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan antar Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press
- Fitriani. 2018. *Membangun Desa Idaman*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi.
- Hartono. 2017. *Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasan Basri.2005. *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ibrahim, Andi. 2016. *Manajemen dan Administrasi Perpustakaan*. Makassar: Penerbit Syahadah.
- Muhammad Irsyad Alfatih, Edi Dimiyati. 2020. *Inspirasi Literasi Menyalakan Asa Lewat Perpustakaan Desa*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Oppi, Andini. 2019. *Cara Cerdas Mengelola Perpustakaan Desa*. Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia.
- Rokhmin Dahuri, Iwan Nugroho. 2004. *Pembangunan Wilayah: persepektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suprihatini, Amin.2018. *Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa*. Klaten: Cempaka Putih.
- Wahjudi, Abdul. 2018. *Maju Dengan Membaca*. Klaten: Cempaka Putih.

Jurnal :

- Ananda, Andrea Ardi. Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Community Engagement Di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Vol 22. No.3. Tahun 2015.

- Anita Tri Widiyawati. Model Pengembangan Pemberdayaan Pengetahuan (Studi Pada Perpustakaan Desa Paseban, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Jurnal Ilmu Perpustakaan. Vol 4. No 1. Tahun 2020.
- Asmoro, Bramantyo Tri, dan Devy Kumala Sari. . Meningkatkan Literasi Siswa Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Melalui Revitalisasi Perpustakaan Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 3. No 2. Tahun 2020.
- Danuar, Danuar. Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Motivasi Total (Total Motivation): Penerapan Di Perpustakaan Atap Langit, Desa Air Mesu Timur. Jurnal Ilmu Perpustakaan. Vol 22. No 1. Tahun 2015.
- Putri, Rizqi Permata, dan Roro Isyawati Permata G. Transformasi Perpustakaan Desa Bandung Kidul Sebagai Sarana Mengatasi Kesenjangan Akses Informasi. Jurnal Ilmu Perpustakaan. Vol 8. No 2. Tahun 2020.
- Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Perpustakaan Desa.
- Peraturan Bupati Kabupataen Kampar Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
- Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 04/DPK/730 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Perpustakaan Desa

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik

